

Analisis Potensi Hutan Kemasyarakatan dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat di Desa Bukit Rawi Kabupaten Pulang Pisau

Sari Marlina*, Mahdiani

¹Program Studi Kehutanan, Fakultas Pertanian dan kehutanan, Universitas Muhammadiyah Palangkaraya

*Email: marlinasari@umpr.ac.id dan deamahdiani@gmail.com

Artikel diterima : 18 Desember 2025. Revisi diterima : .5 Maret 2026.

ABSTRACT

This study aims to increase community engagement, with an emphasis on ecological, social, and economic aspects. The methods used in this study were qualitative data collection such as interviews, observation, and documentation, involving 10 participants from the village community. The research findings indicate that the area has promising ecological potential, with biodiversity that includes meranti and ironwood trees, as well as high-value non-timber forest products such as honey, rattan, and agarwood. Variations in land availability are seen, with the average size of a home yard reaching 300 m², family land 5,000 m², and leased land around 10,000 m². The level of community participation increased in agricultural activities, forest protection, and organizational management; among respondents, 50% work as farmers, with monthly incomes ranging from 0–500,000 IDR and 600,000–1,000,000 IDR. Half of them rely on their own capital, while the other half receive government assistance annually. Several supporting factors include legal access to forest land, training in forest management, and guidance from non-governmental organizations. This research contributes to understanding how forest management can be maximized as a means of empowering communities, provided there is a solid organizational structure and a sustainable capacity-building program implemented to address issues of forest degradation.

Key words: Community forestry, community participation, community empowerment, ecological potential, social economy.

ABSTRAK

Hutan kemasyarakatan bertujuan untuk melibatkan masyarakat dalam pengelolaan hutan yang berkelanjutan. HKm meningkatkan partisipasi masyarakat di Desa Bukit Rawi, Pulang Pisau. Metode yang digunakan adalah kualitatif pengumpulan data melalui wawancara, observasi, analisis dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hutan memiliki keanekaragaman hayati, ketersediaan lahan, dan selaras dengan kondisi sosial setempat. Partisipasi masyarakat meningkat melalui budidaya, perlindungan hutan, dan manajemen organisasi. Faktor-faktor yang mendukung partisipasi meliputi akses legal ke lahan hutan, pelatihan dari KPH, dan bimbingan dari lembaga swadaya masyarakat. Analisis menunjukkan bahwa Hutan Kemasyarakatan memiliki potensi besar untuk mendorong keterlibatan masyarakat secara aktif, asalkan ada struktur organisasi yang baik dan program pemberdayaan yang berkelanjutan.

Kata kunci: Hutan kemasyarakatan, partisipasi masyarakat, Pemberdayaan masyarakat, potensi ekologi, ekonomi sosial.

PENDAHULUAN

Sebagian besar riset mengenai Hutan kemasyarakatan di Kalimantan Tengah lebih banyak berfokus pada aspek ekologi atau ekonomi dalam skala besar, namun kajian yang mengaitkan potensi ekologi-sosial secara bersamaan dengan keterlibatan masyarakat di tingkat desa tertentu masih sangat kurang. Selain itu meskipun sejumlah penelitian menunjukkan bahwa konflik terkait hak katas tanah menjadi hambatan utama belum tersedia analisis mendalam tentang bagaimana kebijakan local suku Dayak di Desa Bukit Rawi berinteraksi dengan peraturan resmi guna mendorong partisipasi keunikan penelitian ini terletak pada tiga aspek: pertama, penekanan

pada Desa Bukit Rawi yang memiliki karakteristik lahan gambut dan potensi hasil hutan non-kayu yang khas seperti madu kelulut dan gaharu; kedua analisis menyeluruh terhadap perbedaan paertisipasi diantara berbagai kelompok (laki-laki, Perempuan, dan pendatang); dan ketiga, kajian tentang Kerjasama antara dukungan dari kesatuan pengelolaan hutan organisasi non-pemerintah serta struktur organisasi lokal dalam memaksimalkan potensi sebagai alat pemberdayaan. Hasil temuan ini di harapkan dapat mengisi kekosongan dalam penelitian sebelumnya dan memberikan pedoman yang jelas untuk pengembangan program hutan kemasyarakatan di daerah dengan kondisi

sejenis yang di Kelola oleh penduduk setempat dengan menggunakan system pengelolaan hutan. Masyarakat memiliki peran signifikan dalam hal sosial mengenai keberlanjutan hutan dan penguatan ekonomi komunitas para tani dapat dimanfaatkan untuk mengolah hasil hutan demi peningkatan pendapatan hutan kemasyarakatan di Desa Bukit Rawi berfokus pada pengembangan perternakan, budidaya madu kelulut, dan pemanfaatan hasil hutan non-kayu lainnya.

Desa Bukit Rawi juga memanfaatkan sumber daya hutan sambil tetap memperhatikan aspek ekonomi, manfaat sosial dari hutan, serta fungsinya untuk menjaga keseimbangan ekosistem (Permatasari dkk., 2023). Warga setempat bertanggung jawab dalam pengelolaan dan penanaman berbagai jenis tanaman, baik tanaman pangan maupun tanaman hutan (Haikal dkk., 2020). Tujuan utama adalah untuk membentuk kelompok tani hutan sebagai sekelompok individu yang berkolaborasi demi kemajuan usaha masing-masing, dengan mempertimbangkan beragam kepentingan, kondisi sosial ekonomi, sumber daya, kesamaan produk, dan hubungan yang dekat (Kelompok Tani Sintuvu Roso Dalam Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan Maiwa dkk., 2023). Hasil hutan non-kayu, seperti buah-buahan, madu, rotan, dan tanaman obat herbal, diharapkan dapat dikembangkan melalui sistem agroforestry yang juga berkontribusi pada konservasi air, pencegahan erosi, dan

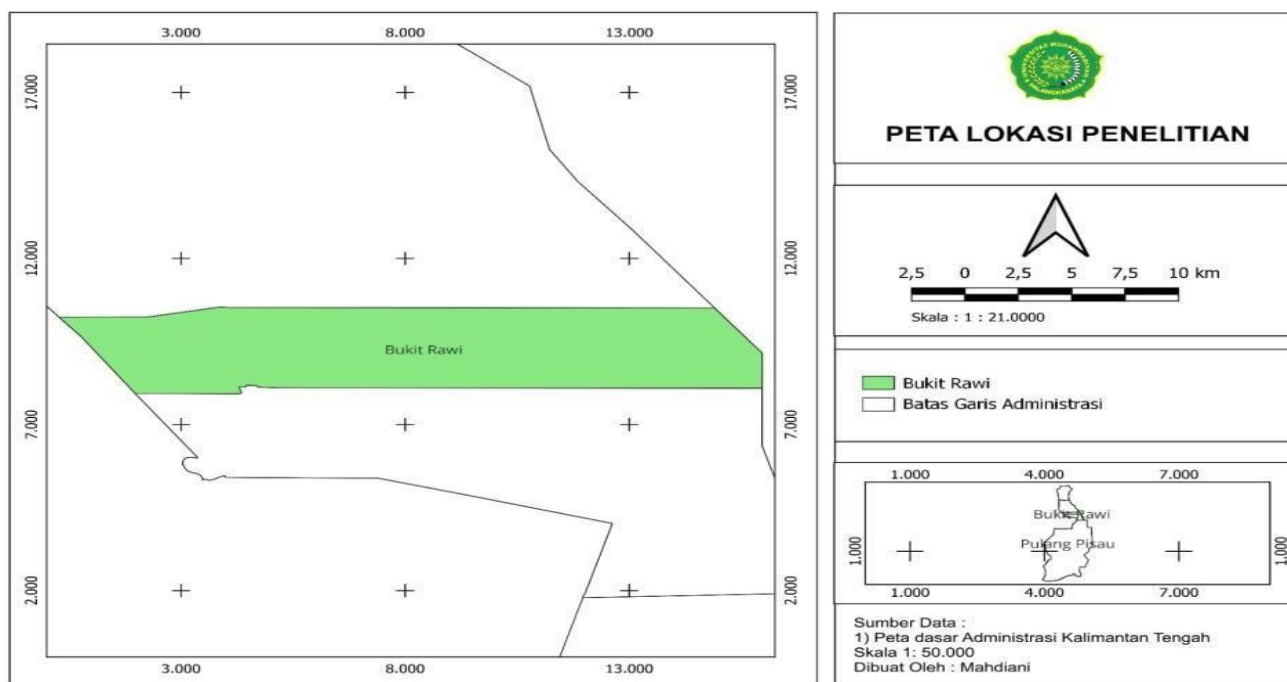
penyerapan karbon. Selain itu, Desa Bukit Rawi kaya akan budaya yang mendalam dan memegang peranan penting dalam tradisi serta kearifan lokal (Sari dkk., 2024).

Hutan kemasyarakatan di Desa Bukit Rawi memiliki peranan dalam mendukung aspek ekonomi, sosial, dan ekologi masyarakat, sehingga untuk menjamin kesejahteraan penduduk, pengelolaan hutan kemasyarakatan harus dilakukan secara berkelanjutan (Transdisiplin Pertanian Budidaya Tanaman dkk., 2023). Salah satu metode untuk memastikan keberlanjutan sumber daya ini adalah dengan pengelolaan di tingkat masyarakat, yang bertujuan untuk melestarikan dan mencegah penurunan kualitas hutan, serta menjaga lingkungan agar terhindar dari kerusakan (Petani dan Kontribusi Hutan Kemasyarakatan Terhadap Pendapatan Petani di Kulon Progo dkk., 2017). Penelitian bertujuan untuk menganalisis potensi hutan kemasyarakatan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat di Desa Bukit Rawi, Kabupaten Pulang Pisau.

BAHAN DAN METODE

Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlangsung di Desa Bukit Rawi, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah dari bulan November 2024 hingga April 2025. (Gambar 1).



Gambar 1. Lokasi penelitian Desa Bukit Rawi Kabupaten Pulang Pisau.

Prosedur Penelitian

Pada tabel 1, 2, dan 3, dapat dilihat bahwa total responden berjumlah 10 orang. Meski demikian, dalam penelitian kualitatif, merupakan keseluruhan informan masyarakat dan terdapat informan lain seperti kepala desa. Kriteria Informan yang diteliti adalah komunitas yang berpartisipasi dalam pengelolaan hutan yang dikelola oleh masyarakat, Individu yang terlibat secara aktif dalam pengelolaan hutan yang dikelola oleh masyarakat di Desa Bukit Rawi, memiliki pengalaman dalam mengelola tanah atau produk hutan (baik dari hasil kayu maupun non-kayu), mewakili beragam kelompok dalam komunitas, termasuk laki-laki, perempuan, dan berbagai jenis pekerjaan (seperti petani, pedagang, dan wirausaha). mampu memberikan informasi yang berkaitan dengan keadaan sosial, ekonomi, dan ekologi yang berhubungan dengan hutan yang dikelola oleh masyarakat. Informasi utama diperoleh melalui wawancara dibagi menjadi beberapa bagian, seperti informasi mengenai responden (usia, pendidikan, pekerjaan), wawasan tentang hutan kemasyarakatan, cara-cara partisipasi dalam manajemen hutan, faktor-faktor yang mendukung serta yang menghalangi partisipasi, dan pandangan mengenai keuntungan dari program tersebut. Pertanyaan bisa bersifat terbuka untuk mendorong penjelasan yang lebih dalam dari para informan, observasi menitik beratkan pada keadaan fisik area hutan kemasyarakatan (keanekaragaman spesies, tutupan lahan), aktivitas masyarakat dalam pengelolaan hutan (seperti menanam, melindungi, dan menggunakan hasil hutan), serta perubahan sosial dalam komunitas terkait dengan pengelolaan hutan. Menggunakan kombinasi wawancara, pengamatan, dan pencatatan untuk mengecek kebenaran informasi yang didapat. Menyampaikan kembali hasil analisis kepada beberapa narasumber agar dapat dipastikan bahwa pemahaman peneliti sejalan dengan perspektif pengalaman mereka, pengamatan, dan pengumpulan dokumen. Sumber data melibatkan penandaan bagian-bagian teks dari transkrip wawancara, catatan observasi, dan dokumen dengan kode yang sesuai. Selanjutnya, kode-kode yang berkaitan dikelompokkan menjadi tema utama, seperti "potensi ekologi dari hutan masyarakat", "bentuk partisipasi warga", "faktor yang mendukung partisipasi", dan "tantangan dalam manajemen." Setelah itu, tema-tema dianalisis untuk memahami maknanya dan hubungan antar tema, guna memenuhi tujuan

penelitian. Akhirnya, hasil analisis diatur menjadi bentuk yang jelas.sekunder.

Analisis Data

Analisis deskriptif kualitatif digunakan untuk menjelaskan situasi sosial, ekonomi, dan ekologi di Desa Bukit Rawi. Faktor yang dianalisis meliputi usia, pendidikan, agama, keterlibatan masyarakat, jenis pekerjaan, pendapatan, dan modal. Aspek ekologi mencakup sumber daya alam, kualitas tanah, keanekaragaman hayati, serta kondisi sebelum dan sesudah pengelolaan hutan oleh masyarakat. Tantangan utama adalah menemukan keseimbangan antara kebutuhan manusia dan perlindungan alam, di mana dimensi sosial, ekonomi, dan ekologi saling terkait. Usia dapat mempengaruhi kemampuan bertani, pendidikan berhubungan dengan sikap konservasi, dan suku serta agama berkontribusi pada pemahaman sumber daya alam. Kolaborasi dalam pengelolaan hutan membantu kesejahteraan dan pelestarian lingkungan. Ada peningkatan dalam pekerjaan dan pendapatan, serta dukungan modal yang membantu komunitas mengelola hutan terdegradasi. Petani terdorong untuk mengembangkan hutan karena kesadaran akan pentingnya lingkungan dan dampak negatif dari lahan yang terbengkalai. Perkembangan ini berdampak signifikan pada aspek sosial, ekonomi, dan ekologis, dengan indikator seperti kesempatan kerja, struktur ekonomi, pendapatan, dan kepedulian masyarakat

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keadaan Umum Lokasi Penelitian

Desa Bukit Rawi terletak di Kecamatan Kahayan Tengah, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, dalam area dataran rendah yang memiliki lahan rawa dan hutan dekat Sungai Kahayan. Jaraknya sekitar 27 km dari Kota Palangkaraya dan memiliki luas 15 hektar, berbatasan dengan beberapa desa lainnya. Desa ini terkenal dengan keindahan alamnya, termasuk ekosistem hutan rawa dan lahan gambut. Penduduknya, mayoritas suku Dayak, mengandalkan pertanian, perikanan, dan kehutanan untuk ekonomi mereka, dengan komoditas utama seperti karet dan produk hutan non-kayu. Masyarakat melestarikan tradisi dan mengutamakan kerjasama dalam pengelolaan hutan.

Pembahasan tujuan utama hutan kemasyarakatan, melibatkan masyarakat dalam

pengelolaan berkelanjutan, sejalan dengan peningkatan partisipasi melalui berbagai bentuk keterlibatan dalam pengelolaan hutan komunal di wilayah pedesaan Indonesia, peran gender dipisahkan. Untuk memungkinkan masyarakat untuk secara sadar mengikuti prinsip pengelolaan berkelanjutan, sosialisasi yang lebih efektif diperlukan, meskipun ada keterbatasan pemahaman tentang istilah hutan kemasyarakatan dan kompatibilitas dengan kegiatan tradisional, serta memiliki potensi untuk mengembangkan dengan dukungan ekologi yang baik dan partisipasi aktif (Apriliani Pengabdian Kampus dkk., 2024).

Potensi Hutan Kemasyarakatan Di Desa Bukit Rawi

Desa Bukit Rawi, luas kawasan hutan yang bisa digunakan untuk hutan kemasyarakatan bervariasi. Masyarakat memiliki lahan sendiri, menyewa, atau mewarisi dari keluarga. Luas pekarangan rumah rata-rata 300 m², lahan keluarga 5.000 m², dan lahan sewa sekitar 10.000 m². Keanekaragaman hayati di desa ini termasuk pohon meranti dan kayu ulin, serta tumbuhan bawah seperti rotan dan pakis. Kayu ulin bisa digunakan untuk bangunan, sedangkan meranti untuk perabotan. Hasil hutan non-kayu seperti madu, rotan, dan gaharu juga memiliki nilai ekonomi tinggi. Sebagian besar tutupan lahan terdiri dari hutan sekunder, kebun dan lahan gambut. Perubahan tutupan lahan terjadi karena pembukaan lahan untuk pertanian dan kebakaran hutan, kebakaran sering akibat kegiatan manusia.

Pembahasan Potensi ekonomi dan ekologi dari hutan kemasyarakatan di Desa Bukit Rawi sesuai dengan penelitian menunjukkan bahwa hutan yang dikelola secara masyarakat dan memiliki biodiversitas yang kaya dapat mendukung baik produktivitas maupun konservasi. Aktivitas manusia yang menyebabkan perubahan pada tutupan lahan menjadi tantangan umum dalam pengelolaan hutan bersama, sebagaimana yang juga diungkap dalam penelitian tentang masalah tenurial di area tersebut

Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam pengelolaan Hutan

Kerangka teori arnsstein (tangkai partisipasi warga)

Kerangka ini membagi partisipasi mulai dari level terendah (manipulasi) hingga level

tertinggi (pengendalian oleh masyarakat). Berikut adalah pemetaan hasil temuan:

1. Pertanian tingkat partisipasi Sebagian besar berada pada tahap "Kemitraan" dan "Penempatan" Kemitraan masyarakat terlibat dalam proses pengambilan keputusan mengenai jenis tanaman, metode budidaya, dan sistem agroforestri, berkolaborasi dengan KPH dan LSM dalam sesi pelatihan dan pendampingan. Penempatan dukungan dari pemerintah berupa modal dan bibit menjadi faktor pendorong partisipasi, sehingga beberapa keputusan masih dipengaruhi oleh pihak eksternal. Elemen pengendalian warga tampak dalam pengelolaan tanah keluarga dan lahan sekitar rumah yang dilakukan secara mandiri berdasarkan pengetahuan lokal tanpa keterlibatan pihak luar.
2. Perlindungan hutan partisipasi interaktif Komunitas berkolaborasi dengan pemerintah, KPH, dan organisasi non-pemerintah dalam proses pemantauan kesehatan hutan, pengendalian kebakaran, dan pelestarian biodiversitas. Mobilisasi mandiri komunitas secara otonom menyusun kegiatan konservasi yang berlandaskan pengetahuan lokal mengenai pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem hutan rawa dan lahan gambut. Partisipasi evaluatif Komunitas dapat mengenali perubahan pada kondisi hutan sebelum dan sesudah proses pengelolaan, serta memberikan umpan balik mengenai efektivitas langkah-langkah perlindungan.
3. Pengelolaan Organisasi Tingkat keterlibatan mayoritas berada dalam fase "Pebetulan" hingga "Kemitraan" Pebetulan kelompok pertanian hutan memiliki organisasi namun sering kali masih tergantung pada instruksi dari pemerintah atau LSM dalam urusan administratif dan distribusi hasil. Kemitraan Pertemuan masyarakat dan pembagian tugas dilakukan secara kolaboratif dengan pihak luar, meskipun kemampuan manajerial masih perlu ditingkatkan. Elemen penyampaian penyuluhan dan pembelajaran mengenai HKM yang diberikan kepada masyarakat tergolong pada tingkat awal keterlibatan.

Kerangka teori pretty (dimensi partisipasi)
Kerangka ini mengklasifikasikan tipe partisipasi

tergantung pada sifat dan tingkat keaktifan masyarakat. Berikut adalah pemetaan hasil temuan:

1. Pertanian partisipasi spontan aktivitas pertanian yang dilakukan oleh keluarga dan di halaman rumah dengan cara mandiri, berdasarkan tradisi dan pengetahuan lokal, tanpa ada dorongan dari program eksternal. Partisipasi yang dipicu keterlibatan dalam program hutan kemasyarakatan yang didorong oleh pelatihan, dukungan finansial, dan pendampingan dari pemerintah serta organisasi non-pemerintah. Partisipasi fungsional kerjasama dalam pengembangan sistem agroforestri yang bukan hanya meningkatkan pendapatan, tetapi juga menjaga keberlanjutan lingkungan, mencerminkan partisipasi yang memiliki tujuan yang jelas dan manfaat Bersama
2. Perlindungan hutan partisipasi interaktif komunitas bersinergi dengan pemerintah, KPH, dan LSM
dalam pengawasan kesehatan hutan, pencegahan kebakaran, serta upaya pelestarian keanekaragaman hayati. Mobilisasi mandiri komunitas secara otonom menyusun dan melaksanakan kegiatan konservasi berdasar pada pengetahuan lokal mengenai pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem hutan rawa dan lahan gambut. Partisipasi evaluative komunitas dapat mengenali perubahan dalam kondisi hutan yang terjadi sebelum dan setelah pengelolaan, serta memberikan umpan balik terkait efektivitas langkah perlindungan yang diambil.
3. Manajemen organisasi partisipasi reaktif: keterlibatan dalam pengelolaan kelompok tani sebagai respons terhadap program dan bantuan yang diberikan pihak eksternal. partisipasi interaktif terlihat dalam proses pengambilan keputusan kolektif, distribusi tugas, serta komunikasi antara anggota kelompok dan pihak- pihak terkait. Partisipasi finansial sebagian individu memanfaatkan modal pribadi untuk meningkatkan usaha di

bawah organisasi, sementara yang lain bergantung pada dukungan pemerintah atau iuran anggota meskipun iuran belum menjadi sumber pembiayaan utama.

Jenis Perkerjaan

Di Desa Bukit Rawi, ada berbagai jenis pekerjaan. Penduduknya bekerja sebagai petani, pedagang, pengolah karet, serta berusaha mandiri, dan melakukan pekerjaan lainnya.

Narasi Analitis Komposisi jenis pekerjaan di kalangan populasi menggambarkan bahwa mayoritas (50%) berprofesi sebagai petani, yang secara langsung berkaitan dengan pengelolaan lahan dan sumber daya alam— yang memberikan dasar yang kokoh untuk terlibat dalam Hutan Kemasyarakatan (HKm). Pengalaman mereka dalam merawat tanaman (seperti karet dan produk hutan non-kayu) menjadi dasar awal untuk berpartisipasi dalam program agroforestri, budidaya madu kelulut, atau pemanfaatan hasil hutan lainnya dalam hutan kemasyarakatan .Segmen masyarakat (20%) yang berprofesi sebagai pedagang memiliki peran krusial dalam mempercepat nilai ekonomi HKm, karena mereka dapat menjadi penghubung akses pasar bagi produk dari pengelolaan hutan. Namun, partisipasi mereka dalam kegiatan teknis HKm cenderung terbatas, sehingga dibutuhkan pendekatan khusus untuk memaksimalkan kontribusi mereka sebagai agen pemasaran. Responden yang memiliki profesi sebagai wiraswasta (30%) menunjukkan potensi dalam mengembangkan usaha berbasis secara lebih terencana, seperti pengolahan hasil hutan non-kayu menjadi produk yang memiliki nilai tambah. Namun, pengetahuan mereka terkait manajemen hutan berkelanjutan perlu ditingkatkan agar usaha yang dikelola sejalan dengan prinsip secara keseluruhan, distribusi pekerjaan ini menunjukkan bahwa masyarakat memiliki basis ekonomi yang sangat terkait dengan kekayaan hutan, namun ada kebutuhan untuk menyelaraskan kapasitas masing-masing kelompok pekerja dengan kegiatan HKm— contohnya melalui pelatihan khusus bagi pedagang mengenai strategi pemasaran produk HKm dan bagi wiraswasta tentang teknologi ramah lingkungan dalam pengolahan hasil hutan.

Tabel 1. Jenis Perkerjaan Masyarakat Desa Bukit Rawi

Jenis Pekerjaan	Jumlah Responden	Persentase (%)
Petani	5	50%

Pedagang	2	20%
Wiraswasta	3	30%
Lain-lain	-	-
Total	10	100%

Jumlah Pendapatan

Pendapatan warga Desa Bukit Rawi bervariasi dan tidak menentukan responden dari lahan hutan masyarakat, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti luas area yang dikelola, jenis serta jumlah tanaman, hasil panen, dan seberapa sering panen dilakukan dalam setahun.

Berdasarkan Tabel 2, pendapatan warga Desa Bukit Rawi terdistribusi secara seimbang: 50% memperoleh 0–500. 000 rupiah setiap bulan dan 50% lainnya menerima 600. 000–1. 000. 000 rupiah per bulan, tanpa ada yang mendapatkan lebih dari 1. 000. 000 rupiah per bulan. Berikut adalah implikasinya: Terhadap partisipasi warga yang memiliki pendapatan 0–500. 000 rupiah biasanya menghadapi keterbatasan waktu dan sumber daya untuk berpartisipasi secara aktif dalam pengelolaan hutan kemasyarakatan, karena mereka cenderung lebih mementingkan pekerjaan utama untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Warga dengan pendapatan 600. 000–1. 000. 000 rupiah mempunyai lebih banyak kesempatan untuk berkontribusi, tetapi partisipasi mereka tetap terbatas jika tidak ada motivasi ekonomi yang jelas dari hutan kemasyarakatan.

Terhadap akses modal banyak orang di masyarakat mengandalkan dana pribadi atau bantuan dari pemerintah yang tidak teratur dan jarang (seperti yang ditampilkan di Tabel 3). Pendapatan yang minim menyulitkan mereka untuk mengumpulkan dana guna mengembangkan usaha yang berhubungan dengan HKM, seperti membeli benih atau alat untuk pengelolaan hutan. Bantuan dari pemerintah yang datang hanya setahun sekali juga tidak memadai untuk mendukung kelangsungan aktivitas, sehingga masyarakat mengalami kesulitan melakukan investasi jangka panjang dalam pengelolaan hutan.

Terhadap keberlanjutan pengelolaan pendapatan yang minim dan tidak seimbang dapat memicu kurangnya keinginan untuk melestarikan hutan, sebab komunitas mungkin lebih memilih untuk mengeksploitasi sumber daya hutan secara cepat demi peningkatan pendapatan dalam jangka pendek. Rendahnya pendapatan juga menghalangi masyarakat dalam mengadopsi teknologi atau metode pengelolaan hutan yang berkelanjutan, yang umumnya memerlukan biaya awal yang lebih besar.

Tabel 2. Jumlah Pendapatan Masyarakat Desa Bukit Rawi

Pendapatan/Bulan	Jumlah Responden	Persentasi (%)
0 – 500.000	5	50%
600.000 – 1.000.000	5	50 %
>1.000.000	-	-
Total	10	100%

Sumber Modal

Masyarakat di Desa Bukit Rawi memiliki sumber modal untuk bercocok tanam sendiri. Mereka hanya menerima bantuan modal dari pemerintah setahun sekali, yang mencakup sembako, bibit cabai, pupuk, dan lainnya. Bagi warga yang tidak terlibat dalam pertanian, bantuan sembako juga jarang diberikan, hanya satu kali dalam setahun dan tidak selalu pasti.

Tabel 3 menunjukkan bahwa sumber dana

warga Desa Bukit Rawi terdistribusi secara merata: 50% memanfaatkan dana pribadi dan 50% bergantung pada dukungan dari pemerintah. Berikut adalah hubungan dan saran-sarannya. Hubungan antara sumber dana dengan tingkat partisipasi dan kekuatan usaha:

Dana Pribadi warga yang memakai dana sendiri biasanya memiliki kontrol lebih terhadap usaha yang berhubungan dengan HKM. Mereka cenderung lebih aktif terlibat karena memiliki rasa kepemilikan yang tinggi terhadap kegiatan yang

dilakukan. Namun, kemampuan untuk mengembangkan usaha terbatas oleh jumlah dana yang ada, sehingga akan sulit untuk berinvestasi pada teknologi baru, memperluas lahan, atau melakukan pemasaran dalam skala besar. Kekuatan usaha juga rentan terhadap masalah seperti gagal panen atau perubahan harga, karena tidak ada cadangan dana yang memadai.

Dukungan pemerintah bantuan yang diberikan, seperti sembako, bibit, dan pupuk, membantu memenuhi kebutuhan dasar dan memulai aktivitas pengelolaan hutan. Namun, bantuan yang diberikan tidak rutin (hanya setahun sekali) menyebabkan warga mengalami kesulitan dalam merencanakan kegiatan jangka panjang. Ini mengarah pada partisipasi yang cenderung pasif atau tergantung pada adanya bantuan, serta menurunkan ketahanan usaha karena tidak ada dukungan berkelanjutan jika bantuan tidak tersedia.

Rekomendasi Intervensi

1. Memperluas Sumber Pembiayaan:
Sediakan akses untuk pinjaman kecil dengan

suku bunga rendah atau skema pendanaan kelompok untuk mengurangi ketergantungan pada dana pribadi dan bantuan pemerintah yang tidak konsisten.

2. Pemberdayaan Komunitas: Mendorong pengumpulan kontribusi anggota kelompok sebagai modal bersama, yang bisa dipakai untuk investasi kolektif dan menghadapi risiko secara bersama-sama.
3. Penyempurnaan Bantuan Pemerintah: Sesuaikan jenis dan frekuensi dukungan dengan kebutuhan usaha HKm (contohnya, bantuan untuk modal kerja yang berkelanjutan, pelatihan manajemen keuangan, atau alat untuk pengolahan sumber daya hutan) dan atur pemberiannya secara teratur.
4. Kerja Sama dengan Sektor Swasta: Bentuk kemitraan dengan perusahaan terkait untuk mendapatkan dukungan modal, teknologi, atau akses ke pasar, sehingga dapat meningkatkan daya tahan usaha dan nilai tambah produk HKm.

Tabel 3. Sumber Modal Masyarakat Desa Bukit Rawi

Sumber Modal	Jumlah Responden	Persentase (%)
Modal Sendiri	5	50%
Iuran Anggota Kelompok	-	-
Bantuan dari Pemerintah	5	50%
Total	10	100%

Persepsi Masyarakat Terhadap Program Hutan Kemasyarakatan

Sebagian besar warga Desa Bukit Rawi belum sepenuhnya memahami Hutan Kemasyarakatan, meski mereka merasakan manfaatnya dari pengalaman sehari-hari dalam mengelola hutan dan lahan. Meskipun istilah ini tidak dikenal luas, kegiatan tradisional mereka seperti bercocok tanam sudah sesuai dengan prinsip Hutan Kemasyarakatan. Diharapkan pemahaman yang lebih baik akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan. Pengetahuan mereka tentang manfaat ini bervariasi tetapi ada kemajuan, terutama bagi yang aktif dalam pertanian.

Pembahasan masyarakat berharap selama ada pembinaan, program ini dapat meningkatkan penghasilan melalui hasil hutan non-kayu, agroforestri, dan ekowisata, serta menciptakan lebih banyak pekerjaan untuk generasi muda (Stephani *dkk.*, 2024). Namun, ada hambatan

seperti kurangnya pengetahuan, pendidikan rendah, kurangnya motivasi, regulasi yang tidak mendukung, dan akses dana yang terbatas. Masyarakat harus menghadapi tantangan beradaptasi dan bekerja keras agar pengelolaan Hutan Kemasyarakatan dan pengembangan desa dapat berhasil.

Analisis Potensi Hutan Kemasyarakatan Sebagai Instrumen Pemberdayaan Masyarakat

Desa Bukit Rawi di Kabupaten Pulang Pisau memiliki potensi besar untuk mengembangkan hutan yang dikelola oleh masyarakat. Namun, desa ini mengalami konflik tenurial terkait status hutan dan kegiatan penduduk. Banyak warga menggunakan hutan untuk pertanian, menangkap ikan, dan mengelola hasil hutan. Penyelesaian konflik tenurial sangat bergantung pada hukum yang jelas dan kebijakan yang mengakui hak masyarakat.

Pembahasan hutan kemasyarakatan dapat memberikan peluang ekonomi, memungkinkan

warga untuk mengelola hutan secara berkelanjutan, yang juga menjaga ekosistem. masyarakat di Bukit Rawi memiliki hubungan sosial yang kuat dan pengalaman dalam pengelolaan hutan, mendukung penerapan hutan kemasyarakatan (Padama dkk., 2025).

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Partisipasi Masyarakat

Hutan yang dikelola oleh masyarakat dapat menciptakan pekerjaan dan meningkatkan hidup mereka. Dukungan dari pemerintah sangat penting dalam membuat aturan yang membantu warga mengelola hutan. Bantuan teknis seperti pelatihan dibutuhkan untuk memaksimalkan program ini. Diharapkan masyarakat lebih sadar dan termotivasi untuk mengelola hutan dengan baik. Kerja sama dengan organisasi juga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat. Namun, ada beberapa faktor yang menghambat partisipasi. Konflik kepentingan antara masyarakat dan pemerintah sering kali menjadi penghalang. Kurangnya pengetahuan dan keterampilan pertanian juga menghambat keterlibatan masyarakat. Regulasi yang rumit dan keterbatasan sumber daya juga menjadi hambatan, ditambah kurangnya dukungan dari pemimpin lokal.

Pembahasan Desa Bukit Rawi, warga berperan penting dalam pengelolaan Hutan Kemasyarakatan dengan dukungan dari pemerintah daerah. Kebijakan dan regulasi seperti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 dan aturan lainnya mendukung pengelolaan ini. Pemangku kepentingan utama terdiri dari masyarakat, pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan badan usaha yang terlibat dalam pengelolaan hutan (Asy'ari & Astuti, 2025).

Strategi Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Program Hutan Kemasyarakatan

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan sangat penting. Kerjasama antara warga, pemerintah, dan lembaga lain diperlukan untuk menjaga keberlanjutan hutan. Pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam mengelola hutan serta mengembangkan ekonomi lokal berkontribusi besar pada kesejahteraan mereka. Usaha kecil dan menengah yang menggunakan sumber daya lokal dapat meningkatkan pendapatan. Nilai lokal seperti gotong royong mempererat komunitas, sementara kearifan lokal diperlukan untuk menjaga lingkungan. Pendampingan teknis dan sosial sangat penting untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan hutan.

Pembahasan pelatihan tentang pengelolaan hutan dan ekonomi lokal membantu

pengembangan berkelanjutan. Penguatan lembaga lokal agar dapat mengelola hutan dan menyelesaikan konflik. Pendidikan bagi pengurus lembaga lokal menjadi langkah nyata untuk mencapai pengelolaan yang efektif. Komunikasi antara lembaga lokal dan masyarakat yang baik akan memperkuat kerjasama dalam pengelolaan sumber daya (AlVinA sAtriAWAn dkk., 2025). Kolaborasi dengan pemerintah dan organisasi lain juga diperlukan untuk meminimalisasi konflik. Peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan dapat meningkatkan kesejahteraan dan ekonomi lokal. Menggabungkan pengetahuan tradisional dengan teknik modern dalam pengelolaan hutan penting untuk keberlanjutan dan pengembangan ekonomi di desa.

Dampak Potensi Hutan Kemasyarakatan Terhadap Aspek – Ekonomi – Ekologi

Masyarakat Desa Bukit Rawi bisa meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka dengan mengelola hutan secara ramah lingkungan, mengembangkan usaha kecil dan menengah, serta memperbaiki akses ke layanan publik (Charity Hidayat dkk., 2020). Ini akan membantu meningkatkan pendapatan dan mengurangi kemiskinan dengan menciptakan lapangan kerja.

Pembahasan masyarakat memiliki potensi memperkuat kohesi sosial melalui kegiatan sosial dan budaya, serta memiliki pengetahuan tradisional yang berharga untuk mengelola lingkungan. Pelestarian budaya, seperti bahasa dan seni, penting untuk menjaga identitas lokal. Terlibat dalam pengelolaan hutan dan menggunakan teknologi ramah lingkungan juga untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan mencegah kerusakan lingkungan.

Rekomendasi Pengembangan Program Hutan Kemasyarakatan Di Desa Bukit Rawi

Masyarakat Implementasi Program Hutan Kemasyarakatan dimulai dengan sosialisasi di desa untuk menjelaskan manfaat dan tujuan program. Pelatihan dan pendampingan diadakan untuk pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Infrastruktur seperti jalan dan jembatan penting untuk mendukung keterlibatan masyarakat Desa Bukit Rawi. Monitoring dan evaluasi dilakukan melalui pengamatan, wawancara, dan diskusi untuk menilai partisipasi masyarakat dan keberhasilan program.

Pembahasan kerjasama antara masyarakat, pemerintah, dan lembaga lain sangat dibutuhkan untuk keberlanjutan. Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan, serta dukungan dari sektor swasta, juga penting

(Mukhlisa dkk., 2024).. Pengembangan kemitraan yang berbasis kepentingan bersama dan komunikasi yang transparan akan memperkuat pelaksanaan program dan mendorong keberhasilan.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan Hutan masyarakat di Desa Bukit Rawi memiliki banyak potensi karena tanahnya subur dan cocok dengan kondisi sosial penduduk. Warga semakin terlibat dalam pengelolaan hutan melalui kegiatan seperti penanaman, pelestarian, dan pengelolaan organisasi. Beberapa faktor yang mendukung partisipasi warga termasuk akses legal ke lahan, pelatihan, dan dukungan dari lembaga yang berwenang. Hutan Masyarakat dapat meningkatkan partisipasi warga jika ada struktur organisasi yang baik dan program pemberdayaan yang terus menerus.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Kepala Desa Bukit Rawi Kabupaten Pulang Pisau dan seluruh masyarakat Desa Bukit Rawi yang telah berpartisipasi dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Apriliani, Y., Pajariah, W., Ramadani, N., & Arifin J., Pengabdian Kampus Universitas Palangka Raya, S. (2024). *Pemberdayaan Masyarakat Desa Bukit Rawi, Kalimantan Tengah, Melalui Pertanian Terpadu Di Lahan Perkarangan*. 11(1) , 84-88.
- Alvina Satriawan, H., Mustafa Umami, A., & Hikmatiar Al Qindy, Fa (2025). Optimalisasi Peran Pemerintah Desa Dalam Perencanaan Pemanfaatan Perizinan Hutan Kemasyarakatan Optimizing The Role Of Village Government In Planning The Utilization Of Community Forest Permits Wahyuddin (Vol. 5, Issue 1). <http://Journal.Unram.ac.id/index.php/privatelaw/index>
- Asy'ari, M. N. H., & Astuti, S. J. W. (2025). Analisis Konsep Pentahelix Dalam Pengembangan Edu Wisata Sebagai Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Hindrosari

Kecamatan Menganti Kabupaten Grerik. Map (*Jurnal Manajemen Dan Administrasi Publik*), 7(4), 461-474.

<https://doi.org/10.37504/map.v7i4.693>

- Charity Hidayat, D., Maryani, R., Irawanti, S., Luthfi Susanto, M., & Ridho Witono, J. (2020). Analisis Finansial Pupuk Organik Cair Kelompok Tani Hutan Kemasyarakatan Harapan Maju Di Desa Mobui Sebagai Upaya Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial. *Jurnal Penelitian Sosial Dan Ekonomi Kehutanan*, 17(1), 1-12.
<http://doi.org/10.20886/jpsek.2020.17.1.1-12>.
- Hadi, H. (2021). Analisis Dampak Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKM) di Desa Sapit Kecamatan Suela Kabupaten Lombok Timur. In *Jurnal Geodika* (Vol. 2, Issue 1). (Vol. 2, Issue 1).
- Haikal, F., Safe'i, R., & Darmawan, A. (2020). *Importance of Monitoring of Forest Health In Management of Community Forest (Case Study of HKM Beringin Jaya Managed by KTH Lestari Jaya 8)*. *Jurnal Hutan Pulau-Pulau Kecil*, 4(1), 31-43.
<http://doi.org/10.30598/jhppk.2020.4.1.31>
- Indra, M., Amelia, V., & Sukarna, R. M. (2024). Kajian Konflik Tenurial Hutan Berbasis Perubahan Tutupan Lahan di KSA/ KPA Bukit Rawi Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah. *Hutan Tropika*, 19(1), 6-18.
<https://doi.org/10.36873/jht.v19i1.14220>
- Maiwa, A., Pribadi, H., Kehutanan, J., Kehutanan, F., Tadulako Jl Soekarno-Hatta Km, U., & Tengah, S. (2022). Warta Rimba : Jurna Ilmiah Kehutanan Ketergantungan Masyarakat Terhadap Lahan Hutan Kemasyarakatan Di Desa Wombo Kalonggo Kecamatan Tanahtovea Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah.
- Mukhlisa, A. N., Mirnawati, M., Asriany, A., Bahar, I., Ardiyansyah, D., Alamsyah, I., & Astriana, A (2024). Peningkatan Efektivitas Administrasi Kelompok Tani Hutan Melalui Digitalisasi Di Desa Patanyamang. Bima Abdi : *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(3), 206-214.
<https://doi.org/10.53299/bajpm.v4i3.940>
- Nindra Sari, R., Daud, M., Naufal, N., &

- Samrin, S. (2024). Di Desa Anrang Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba. <https://doi.org/10.2429/fces01>
- Permatasari, D., Hatta, G. M., Syarifuddin, D., Program, K., & Kehutanan, S. M. (2023). Efektivitas Sosial Ekonomi Program Perhutanan Sosial pada Areal Hutan Kemasyarakatan (HKM) di Desa Tebing Siring Das Tabunio Kabupaten Tanah Laut. In *Jurnal Hutan Tropis* (Vol. 11, Issue 4). Cetak.
- Petani dan Kontribusi Hutan Kemasyarakatan Terhadap Pendapatan Petani di Kulon Progo, K., Novita Dewi, I., Afri Awang, S., Andayani, W., Suryanto, P., Litbang Lingkungan Hidup dan Kehutanan, B., Perintis Kemerdekaan, J. K., Ilmu Kehutanan, J., Penelitian, H., & masuk, N. (2017). *Characteristic of Farmer and Contribution of Community Forestry to Farmer's Income in Kulon Progo*. Riwayat naskah. <https://jurnal.ugm.ac.id/jikfkt>
- Padama, S. N., Elise Mau, A., Silvia Sinaga, P., & P.L.B Riwau Kaho, N. (2025). Evaluasi Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) dan Dampak Terhadap Kondisi Hutan di Kelompok Perhutanan HKm Buli Uher, Desa Ilinmedo Kecamatan Waiblama Kabupaten Sikka. *Wahana Forestra: Jurnal Kehutanan*, 20(1), 43-57. <http://doi.org/10.31849/foresta.v20i1.22299>
- Stephani, S., Hamzah, H., & Syarifuddin, H. (2024). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Pada Sistem Agroforestri Di Areal Kerja Hutan Kemasyarakatan CaturRahayu. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 24(2), 1319. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v24i2.4736>
- Wati, H. S., Sulo Maripan, L., Mau, A. E., Rammang, N., Studi, P., & Fakultas, K. (2024). *Analysis of Socio- Economic Conditions of The Community In Community Forest Management In Wetan Farmer Group, Sikka Regency*. Analisis Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Dalam Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan di Kelompok Tani Tere Wetan, Kabupaten Sikka. *Journal of Scientech Research and Development*, 6(1). <https://idm.or.id/JSCR/index>